

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Landasan Teori

II.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanannya pada tiga aspek yaitu: proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini akan terlihat aspek dinamis arti suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Proses pertumbuhan dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. Beberapa faktor ekonomi, antara lain:

1. Sumber Alam

Sumber alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian. Sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi, yang mencakup sumber alam antara lain ialah: kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air dan sebagainya, Tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat. Namun yang terpenting ialah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber alam dapat dipergunakan dalam jangka waktu lebih lama.

2. Akumulasi Modal

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi mencerminkan permintaan efektif dan di lain sisi menciptakan efisiensi produktif bagi

produksi di masa depan. Proses pembentukan modal menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara yang bersangkutan. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja serta kemajuan teknologi yang pada gilirannya akan membawa ke arah spesialisasi dan penghematan produksi skala luas.

3. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktifitasnya.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri (Jhingan, 2002).

Faktor non ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam kenyataan, faktor non ekonomi seperti organisasi sosial, budaya, politik mempengaruhi faktor ekonomi seperti yang sudah diungkapkan di atas. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memiliki arti penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Beberapa faktor non ekonomi antara lain:

1. Faktor Sosial

Faktor sosial juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial. Kalau perkembangan ekonomi diinginkan berjalan lancar maka pandangan, nilai dan lembaga-lembaga sosial harus dirubah. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan.

2. Faktor Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka.

3. Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administrasi juga membantu pertumbuhan ekonomi. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup akan amat penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2002).

Perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja produktif dapat dilaksanakan dengan meluaskan landasan kegiatan ekonomi. Tetapi hal itu harus disertai dengan usaha meningkatkan produktifitas baik di bidang kegiatan yang modern maupun yang tradisional (Djojohadikusumo, 1993). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil maka pertumbuhan output perkapita, pertumbuhan upah dan standar hidup menjadi lebih baik, disamping itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan banyak tercipta kesempatan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja.

Menurut David Ricardo, perekonomian di tandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tanah terbatas jumlahnya.

2. Tenaga kerja meningkat atau menurun sesuai dengan apakah tingkat upah diatas atau dibawah upah minimal.
3. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.
4. Sektor pertanian menurun.

Teori David Ricardo yang disebut *Law of Deminishing Return* atau disebut juga *Law of Deminishing Product*, yaitu menurunnya produktifitas tanah akibat terlalu banyaknya tenaga kerja. Sedangkan Lewis seorang ekonom klasik yang terkenal dengan teori pertumbuhan dua sektor, menekankan tentang bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dengan dua sektor yang berbeda yaitu:

1. Sektor tradisional, dengan produktifitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah.
2. Sektor modern, dengan produktifitas tinggi dan akumulasi modal yang banyak.

Proses pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tenaga kerja dapat dipertemukan dengan modal. Tenaga kerja yang melimpah di sektor tradisional (pertanian) sedikit demi sedikit beralih ke sektor modern di perkotaan tanpa menyebabkan sektor tradisional itu sendiri kehilangan tingkat outputnya. Anggapan Lewis ini menerangkan tentang proses peralihan tenaga kerja dan pertumbuhan output dari sektor tradisional ke sektor modern yang disebabkan adanya perbedaan upah pada kedua sektor tersebut.

Kuznets mengemukakan tentang 6 karakteristik terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu :

1. Tingginya tingkat pendapatan per kapita.
2. Tingginya tingkat produktifitas tenaga kerja.
3. Tingginya faktor transformasi struktur ekonomi.
4. Tingginya faktor transformasi struktur ideologi.
5. Tingginya faktor transformasi untuk melakukan perluasan pasar.

6. Adanya kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat terbatas.

Secara khusus karakteristik tingginya faktor transformasi ekonomi ini ditandai dengan perpindahan secara bertahap dari kegiatan yang terpusat di sektor pertanian kepada kegiatan yang terpusat di sektor non pertanian. Perpindahan kegiatan ekonomi ini sejalan dengan perubahan dalam unit-unit produksi. Dari unit-unit produksi berskala kecil yang bersifat tradisional dan bersifat keluarga, menjadi unit-unit berskala besar yang bersifat modern dan berskala nasional atau bahkan internasional. Kegiatan ekonomi semakin berorientasi ke perkotaan, sehingga semakin lama peranan sektor pertanian semakin menurun.

II.1.2 Teori Pertumbuhan Kota

Banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana sebuah kota terbentuk dan kemudian berkembang. Mulai dari teori yang dicetuskan oleh Walter Christaller (1933), hingga teori-teori yang menyatakan bahwa kota terbentuk dalam tingkatan-tingkatan tertentu (*stages*). Beberapa diantaranya adalah:

1. *Three-Stage Theory*, yang dijelaskan oleh Clark (1982), Haggett (1983), Herbert dan Thomas (1994). Meskipun ketiganya mengajukan teori yang serupa, namun model yang diajukan oleh masing-masing penulis memiliki karakteristik yang berbeda. Model yang dikemukakan Clark (1982) membahas evolusi perekonomian perkotaan di Inggris yang memiliki karakteristik yang berbeda di tiap masa. Adapun model dari Haggett (1983) menekankan pada evolusi permukiman perkotaan yang disebabkan oleh mobilitas pekerjaan, perumahan, perkembangan transportasi serta dampaknya terhadap *urban sprawl*. Sedangkan model yang dikemukakan oleh Herbert dan Thomas (1994) lebih menekankan pada perkembangan industri atau proses industrialisasi yang dianggap mempunyai

pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan spasial kota. Akibatnya, pentahapan evolusi kekotaan yang dikemukakan selalu berpatokan pada tiga titik waktu penting yakni: masa sebelum industrialisasi, selama industrialisasi berlangsung dengan gencar, serta masa pasca industrialisasi (Yunus, 2006). Tabel 2-1 merangkum proses kemunculan dan transformasi kota berdasarkan ketiga teori yang dikemukakan di atas.

Tabel 2-1 Tahapan Pertumbuhan Kota Menurut Clark, Hagget, Herbert dan Thomas

	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Clark	Ekonomi paleolitik	Ekonomi neoteknik	Ekonomi manajerial
Hagget	Minopolitan	Metropolitan	Megalopolitan
Herbert dan Thomas	Pra-industrial (<i>urban nucleus</i>)	Industrial (<i>urbanized area</i>)	Pasca Industrial (<i>urban region, conurbation dan complex urban field</i>)

Sumber: Yunus (2006)

2. *Four-Stage Theory*, yang dikemukakan oleh Borchet (1967). Menurut teori ini ada dua hal yang dianggap sebagai determinan perbedaan evolusi perkembangan kota-kota di Amerika Serikat, yaitu (a) perubahan teknologi transportasi dan (b) perubahan teknologi industri (Yunus, 2003). Dengan dasar ini, kota berkembang dalam empat tahap yaitu (a) *sail and wagon epoch*; (b) *steamboat and iron horse epoch*; (c) *steel and rail epoch* dan; (b) *auto-air amenity epoch*.
3. *Six-Stage Theory*, yang dicetuskan oleh Lewis Mumford pada dekade tiga abad 20. Menurutnya, peradaban sebuah kota tumbuh berkembang layaknya makhluk hidup, yaitu mengalami tahap lahir, berkembang, menurun dan mati. Dari enam tahapan

yang dikemukakan, terdapat pembagian menjadi dua kelompok besar yaitu periode meningkatnya peradaban (*three stage of ascension*) dan periode menurunnya peradaban (*three stage of decline*). Tahapan-tahapan tersebut adalah *eopolis*, *polis*, *metropolis*, *megalopolis*, *tyrannopolis*, dan *necropolis*.

4. *Nine-Stage Theory* yang diajukan oleh Whyne-Hammond (1985). Beliau mendasarkan pembagian tahapan pertumbuhan kota pada jumlah penduduk saja dengan mengacu pada kondisi negara Inggris. Kesembilan tahapan pertumbuhan kota tersebut meliputi *isolated dwelling* (hunian terisolir), *hamlet* (dusun), *small village* (desa sempit), *large village* (desa yang luas), *small town* (kota kecil yang sempit), *large town* (kota kecil yang luas), *city* (kota besar), *conurbation* (konurbasi), dan *megalopolis* (kota mega).

Dari keempat teori yang dikemukakan diatas, dapat kita simpulkan bahwa teori-teori ini lebih melihat proses terbentuknya suatu kota berdasarkan faktor perubahan fisiko spasial yang dilihat secara analisis geografi dibandingkan dengan faktor-faktor ekonomi.

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi perkotaan, suatu area geografis dapat didefinisikan sebagai kota apabila di dalamnya terdapat jumlah penduduk yang besar tetapi dengan luas area yang relatif kecil. Dengan kata lain, kota diartikan sebagai wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi dan kemudian terjadi penumpukan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut¹². Kota menyediakan barang publik, pelayanan publik, infrastruktur, dan lapangan kerja yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Kota memiliki daya tarik luar biasa sebagai pusat aktivitas ekonomi sehingga banyak penduduk memilih untuk tinggal di dalamnya. Di sisi lain, berbagai efek negatif dibalik pertumbuhan ekonomi kota yang tinggi seperti polusi, kemacetan, kriminalitas, dan kemiskinan menjadi ciri yang tidak terpisahkan dari wilayah kota. Secara umum, ada tiga alasan terbentuknya

¹² Arthur O' Sullivan, 1996, *Urban Economics 3th edition*,. New york: McGraw-Hill, Hal: 5.

kota, yaitu adanya keuntungan komparatif (*comparative advantage*), skala ekonomi (*economies of scale*), dan agglomerasi ekonomi (*agglomeration economies*).

II.1.2.1 Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif merupakan salah satu faktor determinan dalam pembentukan sebuah kota. Spesialisasi karena adanya keunggulan komparatif, membuat perdagangan antar daerah menjadi lebih menguntungkan, dimana selanjutnya perdagangan antar daerah dapat menyebabkan pembangunan kota yang baru. Dalam sebuah ilustrasi, diasumsikan dalam sebuah wilayah hanya terdapat dua buah kota yaitu Kota X dan Kota Y yang berjarak sejauh 100 Km. Komoditas ekonomi dalam wilayah tersebut hanya berupa beras dan kapas, dimana Kota X memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi beras dan Kota Y memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi kapas.

Dalam kondisi seperti diatas, maka perekonomian akan lebih efisien bila Kota X melakukan spesialisasi untuk memproduksi beras dan Kota Y melakukan spesialisasi untuk memproduksi kapas, lalu kemudian kedua kota tersebut melakukan perdagangan. Untuk mengurangi biaya transportasi, maka selanjutnya akan terbentuk pusat perdagangan (Daerah Z) yang berlokasi diantara kedua kota tersebut. Dengan semakin meningkatnya kerjasama perdagangan antara Kota X dan Kota Y, maka aktivitas ekonomi pun semakin berkembang di Daerah Z dan selanjutnya daerah tersebut akan terus tumbuh berkembang menjadi sebuah kota yang baru (Kota Z).

II.1.2.2 Skala Ekonomi

Skala ekonomi yang cukup besar dapat menjadi salah satu faktor pemicu terbentuknya sebuah kota. Dengan adanya skala ekonomi yang besar pada sebuah pabrik maka dapat terbentuk kota di lokasi tempat pabrik tersebut berada. Para pekerja pabrik

akan menetap di sekitar lokasi untuk mengurangi biaya transportasi. Selain itu, kebutuhan produksi seperti input, promosi, manajemen, dan sebagainya terdorong untuk terpusat pada lokasi tersebut. Dengan adanya para pekerja yang terkumpul dalam satu tempat akan membentuk sebuah kota yang secara agregat outputnya akan meningkat.

II.1.2.3 Aglomerasi Ekonomi

Dalam konteks ekonomi geografi, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi (Malmberg dan Maskell, 2001). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Montgomery dalam Kuncoro (2002) bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*), yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen.

Keuntungan-keuntungan dari konsentrasi spasial sebagai akibat dari ekonomi skala (*scale economies*) disebut dengan ekonomi aglomerasi (*agglomeration economies*) (Mills dan Hamilton, 1989). Pengertian ekonomi aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi merupakan suatu bentuk dari eksternalitas positif dalam produksi, yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota. (Bradley and Gans, 1996). Ekonomi aglomerasi diartikan sebagai penurunan biaya produksi karena kegiatan-kegiatan ekonomi berlokasi pada tempat yang sama. Gagasan ini merupakan sumbangan pemikiran Alfred Marshall yang menggunakan istilah *localized industry* sebagai pengganti dari istilah ekonomi aglomerasi.

Ahli ekonomi Hoover juga membuat klasifikasi ekonomi aglomerasi menjadi 3 jenis (Isard, 1979), yaitu (1) *large scale economies* merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi, (2)

localization economies merupakan keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam industri yang sama dalam suatu lokasi dan (3) *urbanization economies* merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi (penduduk, pendapatan, output atau kemakmuran) dari lokasi tersebut.

Berbeda dengan pendapat para ahli ekonomi yang lain, O'Sullivan (1996) membagi ekonomi aglomerasi menjadi dua jenis yaitu ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ekonomi aglomerasi adalah eksternalitas positif dalam produksi, yaitu menurunnya biaya produksi sebagian besar perusahaan sebagai akibat dari produksi perusahaan lain meningkat.

II.1.2.3.1 Teori Neo Klasik

Sumbangan terbesar teori neo klasik adalah pengenalan terhadap ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. (Kuncoro, 2002). Asumsi yang digunakan oleh teori neo klasik adalah *constant return to scale* dan persaingan sempurna.

Alfred Weber dikenal sebagai pendiri teori lokasi modern yang berkenaan dengan tempat, lokasi, dan geografi, dari kegiatan ekonomi. Minimisasi biaya yang dikombinasikan dengan bobot input-input yang berbeda dari perusahaan dan industri menentukan lokasi optimal bagi suatu perusahaan. Weber secara eksplisit memperkenalkan konsep ekonomi aglomerasi, skala efisien minimum, dan keterkaitan ke depan dan ke belakang. Konsep ini menjadi dasar berkembangnya teori perdagangan regional baru.

Dalam sistem perkotaan teori neo klasik, diasumsikan adanya persaingan sempurna sehingga kekuatan sentripetal aglomerasi disebut sebagai ekonomi eksternal murni

(Krugman, 1998). Kekuatan sentripetal muncul dari kebutuhan untuk pulang-pergi (*commute*) ke pusat bisnis utama dalam masing-masing kota, yang menyebabkan suatu gradien sewa tanah di dalam masing-masing kota. Menurut Krugman (1998), keterbatasan teori neo klasik diantaranya adalah melihat bahwa ekonomi eksternal yang mendorong adanya aglomerasi masih dianggap sebagai misteri (*blackbox*). Disamping itu sistem perkotaan neo klasik adalah non spasial yang hanya menggambarkan jumlah dan tipe kota, tetapi tidak menunjukkan lokasinya.

II.1.2.3.2 Teori Eksternalitas Dinamis

Teori-teori eksternalitas dinamis percaya bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota (Glaeser, et.al. 1992). Teori eksternalitas dinamis didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Marshall-Arrow-Romer (MAR), Porter dan Jacob. Teori-teori ini mencoba menjelaskan secara simultan bagaimana pembentukan kota dan mengapa kota tumbuh.

Eksternalitas MAR menekankan pada transfer pengetahuan antar perusahaan dalam suatu industri. Menurut MAR, monopoli lokal merupakan hal yang lebih baik dibandingkan dengan kompetisi lokal sebab lokal monopoli menghambat aliran ide dari industri lain dan eksternalitas diinternalisasi oleh inovator.

Seperti halnya MAR, Porter mengatakan bahwa dengan transfer pengetahuan tertentu, konsentrasi industri secara geografis akan mendorong pertumbuhan. Berbeda dengan MAR, Porter menyatakan bahwa kompetisi lokal lebih penting untuk mempercepat adopsi inovasi.

Tidak seperti MAR dan Porter, Jacob percaya bahwa transfer pengetahuan paling penting adalah berasal datang dari industri-industri inti. Variasi dan keberagaman industri

yang berdekatan secara geografis akan mendukung inovasi dan pertumbuhan dibandingkan dengan spesialisasi secara geografis.

II.1.2.3.3 Teori Ekonomi Geografi Baru (*The New Economic Geography*)

Teori ekonomi geografi baru berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi dan *increasing return* dari perusahaan. Dalam hal ini ekonomi aglomerasi tidak diasumsikan, tetapi diturunkan dari interaksi ekonomi skala pada tingkat perusahaan, biaya transportasi, dan mobilitas faktor produksi.

Teori ekonomi geografi baru menekankan pada adanya mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi (Krugman dan Venables dalam Martin & Ottaviano, 2001). Dalam model tersebut kekuatan sentripetal berasal dari adanya variasi konsumsi atau beragamnya *intermediate good* pada sisi produksi. Kekuatan sentrifugal berasal dari tekanan yang dimiliki oleh konsentrasi geografis dari pasar input lokal, yang menawarkan harga lebih tinggi dan menyebarkan permintaan. Jika biaya transportasi cukup rendah maka akan terjadi aglomerasi.

Dalam model eksternalitas teknologi, transfer pengetahuan antar perusahaan memberikan insentif bagi aglomerasi kegiatan ekonomi. Informasi diperlakukan sebagai barang publik, atau dengan kata lain tidak ada persaingan dalam memperolehnya. Difusi informasi ini kemudian menghasilkan manfaat bagi masing-masing perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa masing-masing perusahaan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, manfaat interaksi meningkat seiring dengan jumlah perusahaan. Karena interaksi ini informal, perluasan pertukaran informasi menurun dengan meningkatnya jarak. Hal ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi berdekatan dengan perusahaan lain sehingga menghasilkan aglomerasi.

II.1.3 Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja (www.nakertrans.go.id) adalah:

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (UU Pokok Ketenagakerjaan No, 14 Tahun 1969). Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektifitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan”.

Pengertian bekerja menurut indikator ketenagakerjaan (2003) adalah :

“Jika telah melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama satu minggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi”.

Definisi orang bekerja dengan tidak bekerja sangat longgar sehingga penentuan batas antara orang yang bekerja dengan pengangguran sangat tipis. Perbedaan definisi ini juga berbeda antara negara yang satu dengan lainnya, tergantung dari keadaan negara tersebut, terutama dalam penentuan berapa jam seseorang dapat digolongkan menjadi kelompok yang telah bekerja.

BPS membagi tenaga kerja (*employed*) atas 3 macam, yaitu:

1. Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu.

3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja $0 \geq 1$ jam per minggu.

Secara praktis pengertian tenaga kerja atau bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur. Tiap-tiap negara mempunyai batasan umur tertentu bagi setiap tenaga kerja. Tujuan dari penentuan batas umur ini adalah supaya definisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih batas umur yang berbeda, karena perbedaan situasi tenaga kerja di masing-masing negara yang berbeda.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 1998 telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun Indonesia tidak menganut batasan maksimum usia seorang tenaga kerja, hal ini terjadi karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional yang cukup kuat.

Tenaga kerja atau penduduk usia kerja mempunyai perilaku yang bermacam-macam. Dalam hubungannya dengan pasar kerja dan perilaku, mereka dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu golongan yang aktif dan tidak secara ekonomis. Angkatan kerja termasuk golongan yang aktif secara ekonomis dan merupakan bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun mencari pekerjaan, dan yang masih mau dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Biasanya kemauan bekerja tersebut diukur dengan minat dari tenaga kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan kemampuan bekerja diukur dengan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena tenaga kerja mampu menggerakkan faktor-faktor produksi yang lain untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 mengenai ketentuan umum, menyatakan bahwa tenaga

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Payaman J. Simanjuntak (1998) menyatakan bahwa tenaga kerja atau *manpower*, sebagai berikut:

“Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir, walaupun sedang tidak bekerja dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.”

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tiap-tiap negara memberikan batasan umur berbeda. Misalnya, India menggunakan batasan umur 14 sampai 60 tahun. Jadi tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 sampai 60 tahun. Sedangkan orang yang berumur dibawah 14 tahun atau diatas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.

Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari: (1) golongan yang bekerja, (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari: (1) golongan bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan *potential labor force*.

Transformasi dari bukan angkatan kerja ke angkatan kerja (terutama bagi tenaga kerja wanita) sangat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain:

1. Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin besar keinginannya untuk masuk dalam pasar kerja.
2. Tingkat sosial yang lebih tinggi, mempunyai perasaan rendah diri apabila tidak bekerja.

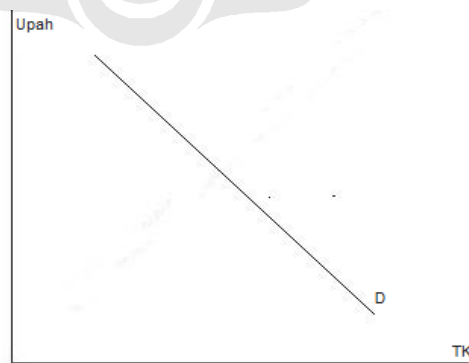
3. Kondisi ekonomi rumah tangga yang mengharuskan wanita bekerja.
4. Semakin panjang usia harapan hidup.
5. Adanya fasilitas atau kemudahan-kemudahan lain yang tersedia menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus rumah tangga berkurang sehingga peluang untuk bekerja diluar rumah sangat besar.
6. Banyak terbuka lapangan kerja baru.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 ke atas, yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

II.1.3.1 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Arfida, BR (2003) menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah, dimana yang dilihat dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan, atau dengan kata lain dibeli.

Gambar 2-1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja



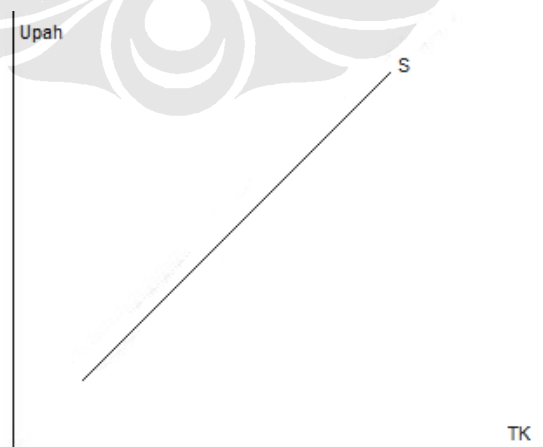
Sumber: Pindyck dan Rubinfeld, Microeconomics 5th ed.

Permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi. Perubahan pada tingkat upah tersebut menimbulkan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja yang terdiri dari efek skala produksi (*scale effect*), yaitu suatu keadaan dimana terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi, yang pada awalnya disebabkan karena naiknya tingkat upah sehingga meningkatkan biaya produksi perusahaan, dan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen pun akan mengurangi konsumsi, akibatnya banyak barang yang tidak terjual, sehingga produsen pun menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan.

II.1.3.2 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus. Penawaran tenaga kerja sendiri menurut Afrida, BR (2003) adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang siap disediakan oleh para pemilik tenaga kerja.

Gambar 2-2 Kurva Penawaran Tenaga kerja

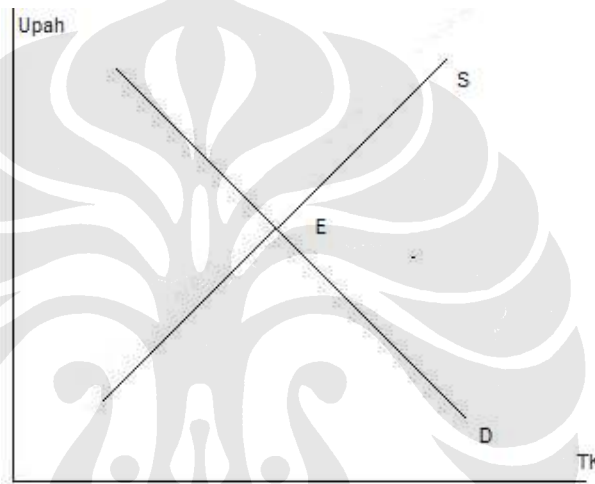


Sumber: Pindyck dan Rubinfeld, Microeconomics 5th ed.

II.1.3.3 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Titik pertemuan/perpotongan (*equilibrium*) antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan terjadi apabila pada tingkat upah tertentu (U_0), dimana pencari kerja (*supply*) menerima pekerjaan yang ditawarkan kepadanya, dan di lain pihak pengusaha (*demand*) bersedia memperkerjakan tenaga kerja tersebut.

Gambar 2-3 Kurva Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja



Sumber: Pindyck dan Rubinfeld, Microeconomics 5th ed.

II.1.3.4 Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Jika kita membicarakan mengenai pasar, berarti ada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Kemudian hal ini akan menentukan harga keseimbangan, harga dari faktor tenaga kerja yang biasa disebut upah. Berdasarkan teori permintaan, sebuah perusahaan akan menggunakan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga keuntungan usaha yang didapatkannya mencapai maksimum (Suparmoko, 1997). Sedangkan penawaran tenaga kerja datangnya dari pemilik tenaga atau buruh. Mereka mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menjual tenaga mereka, atau pada saat mereka mencari pekerjaan, dan dikatakan bahwa mereka menawarkan tenaga mereka. Sesuai

dengan hukum penawaran pada tingkat upah yang tinggi akan banyak jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, sedangkan pada tingkat upah yang lebih rendah akan lebih sedikit tenaga kerja yang ditawarkan (Suparmoko, 1997).

Payaman (1998) mengatakan bahwa permintaan atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada si pembeli. Akan tetapi pengusaha mempekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat atau konsumen. Dengan kata lain, penambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari penambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksikannya. Permintaan akan tenaga kerja itu biasa disebut *derived demand*.

Menganggap bahwa persediaan kapital tetap dan perekonomian berada dalam persaingan sempurna, maka kurva permintaan tenaga kerja dicerminkan oleh kurva produksi, marginal tenaga kerja (MP_L). Dalam persaingan sempurna, sektor perusahaan akan menggunakan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga upah atau uang rata-rata (W) sama dengan tingkat harga umum (P) dikalikan dengan produksi marjinal tenaga kerja (MP_L). Dalam bentuk persamaan hubungan itu dituliskan sebagai berikut:

$$W = P.MP_L \quad \text{atau} \quad \frac{W}{P} = MP_L$$

Ini berarti upah riil sama dengan produksi marjinal tenaga kerja. Persamaan ini menunjukkan bahwa upah (W) adalah biaya tambahan penggunaan satu tenaga kerja lebih banyak dan $P.MP_L$ merupakan tambahan nilai produksi karena penggunaan tenaga kerja tersebut. Selama tambahan nilai produksi lebih besar daripada tambahan biaya, maka perekonomian akan menambah penggunaan tenaga kerja lebih lanjut.

Seperti halnya dengan permintaan tenaga kerja, upah riil mempunyai peranan penting dalam penawaran tenaga kerja. Terdapat hubungan positif antara tingkat upah riil

dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, sehingga apabila upah riil meningkat maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan juga akan meningkat.

II.1.3.5 Analisis Penawaran Agregat

II.1.3.5.1 Menurut Kaum Klasik

Asumsi yang dipakai oleh para pemikir ekonomi klasik yang berkaitan dengan kurva penawaran agregat ialah asumsi kelenturan atau fleksibilitas tingkat harga dan upah. Dengan mendasarkan kepada asumsi ini mereka berkesimpulan bahwa jumlah tenaga kerja yang terpakai dalam perekonomian, yang juga disebut tingkat *employment*, dalam keadaan ekuilibrium senantiasa akan sebesar yang ditunjukkan oleh titik potong kurva permintaan akan tenaga kerja agregatif dengan kurva penawaran tenaga kerja agregatif.

Dengan menggunakan definisi *full employment* atau tingkat pemanfaatan perekonomian penuh sebagai keadaan perekonomian dimana pada tingkat upah yang berlaku semua yang ingin bekerja mendapatkan pekerjaan, maka kaum pemikir ekonomi klasik berkesimpulan bahwa tanpa campur tangan pemerintah, pengangguran dalam perekonomian bertendensi untuk hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan yang diminta, ditentukan bukan oleh upah nominal melainkan oleh upah nyata. Dengan demikian maka jumlah tenaga kerja yang terpakai tidak terpengaruh langsung oleh tinggi rendahnya tingkat harga. Ini selanjutnya berarti bahwa besarnya produk nasional secara langsung juga tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat harga.

II.1.3.5.2 Menurut Keynes

Dalam keadaan resesi atau depresi penawaran tenaga kerja jauh lebih banyak dari pada permintaan tenaga kerja pada tingkat upah riil yang terjadi pada saat itu. Keynes

menyatakan bahwa walaupun upah nominal dapat diturunkan, tetapi upah riil tidak akan turun, sehingga pengangguran tidak akan dapat dihapuskan dan keseimbangan akan terjadi pada tingkat pendapatan full employment. Penawaran upah nominal menurut Keynes akan menyebabkan upah riil turun dan produsen-produsen akan berusaha meningkatkan produksi mereka. Apabila semua produsen menaikkan output mereka, maka akan terjadi kenaikan pendapatan yang akan menyebabkan naiknya konsumsi masyarakat (Dwi Eko Waluyo, 1991).

II.1.3.6 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah yang menunjukkan berapa orang yang telah atau dapat tertampung dalam suatu perusahaan. Kesempatan kerja dapat diwujudkan dengan tersedianya lapangan kerja yang memungkinkan dilaksanakannya bentuk aktivitas yang dinamakan bekerja tersebut. (Simanjuntak, 1998).

Dapat diartikan bahwa kesempatan kerja merupakan lapangan kerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Jadi kesempatan kerja termasuk lapangan kerja yang belum diduduki dan masih lowong. Dengan kata lain kesempatan kerja menunjukkan banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja ini menampung semua tenaga kerja yang tersedia, apabila lapangan kerja yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.

Perluasan kesempatan kerja sangat penting bukan saja untuk mengurangi pengangguran atau peningkatan kemajuan perekonomian nasional secara umum, tetapi juga merupakan salah satu usaha untuk membenahi dan mempertahankan ketahanan nasional Indonesia. Kesempatan kerja yang merupakan kondisi dimana seseorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh imbalan jasa atau penghasilan

dalam jangka waktu tertentu, dapat menjadi hambatan atau kerawanan terhadap ketahanan nasional, jika angkatan kerja yang tersedia tidak mampu diserap oleh adanya kesempatan kerja sebagai prasyarat pembangunan nasional yang berlanjut (Simanjuntak, 1998). Jadi perluasan kesempatan kerja bagi bangsa Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah dan jumlah angkatan kerja juga semakin bertambah. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan nasional dan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.

II.1.4 Tenaga Kerja Sektoral

Untuk melihat kemampuan suatu sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja sekaligus sebagai tolak ukur kemajuan perekonomian suatu daerah, dapat dilihat melalui pendekatan distribusi sektoral. Dalam suatu tahapan perekonomian dari tradisional menjadi berbasis industri, salah satunya ditandai dengan adanya transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor primer (pertanian) dengan kecenderungan produktifitas yang rendah, ke sektor-sektor dengan produktifitas tinggi yaitu sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (jasa).

Untuk negara-negara berkembang, umumnya transformasi sektoral tenaga kerja telah terjadi meskipun masih berjalan dengan sangat lambat. Hambatan penyerapan tenaga kerja terkendala oleh masih rendahnya pembukaan lapangan kerja baru sehingga kesempatan kerja juga masih terbatas. Pada sektor-sektor dengan produktifitas tinggi, terjadi kecenderungan untuk memanfaatkan teknologi yang tinggi dan mereduksi pemakaian sumberdaya manusia, sehingga penyerapan tenaga kerja relatif masih kecil. Sektor primer dalam hal ini pertanian, masih menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk di Indonesia mengingat sifatnya yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan

keterampilan tenaga kerja yang tinggi, sehingga para pekerja pada sektor ini lebih mudah untuk keluar masuk jika melihat ada peluang yang lebih menjanjikan.

II.1.5 Teori Tahapan Linier

II.1.5.1 Teori Rostow

Teori Rostow mengemukakan tahapan transisi dari masyarakat tradisional menjadi modern merupakan pentahapan yang harus dilalui oleh setiap negara. Tahapan perkembangan negara tersebut adalah: (1) masyarakat tradisional (*the traditional society*), (2) prakondisi untuk tinggal landas menuju pertumbuhan berkelanjutan (*the preconditions for take-off*), (3) tahap tinggal landas (*the take-off*), (4) tahap menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), (5) tahap masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi (*the age of high mass consumption*).

Pemisahan tahap-tahap pembangunan ekonomi ini didasarkan pada karakteristik perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Dalam konteks ekonomi, proses perubahan masyarakat ini ditandai dengan adanya penurunan peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri. Selanjutnya konsep ini diuraikan secara lebih rinci oleh Harrod-Domar.

II.1.5.2 Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Model pertumbuhan Harrod-Domar menekankan pentingnya tabungan untuk kegiatan investasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh peningkatan pendapatan nasional (Y). Peningkatan pendapatan nasional memerlukan tambahan stok kapital untuk investasi dalam jumlah tertentu, sehingga terdapat rasio antara pendapatan nasional dengan stok kapital (*capital-output ratio*).

Model ini menyatakan bahwa peningkatan tabungan akan membawa kepada peningkatan stok kapital, yang berarti tersedianya dana untuk meningkatkan investasi. Kemudian, investasi ini akan dipakai untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

II.1.5.3 Model Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural menekankan pada mekanisme transformasi ekonomi di negara terbelakang, dengan kegiatan ekonomi yang bersifat pertanian subsisten menuju negara modern yang berbasis industri manufaktur dan jasa. Proses transformasi ini disebabkan karena adanya surplus tenaga kerja di sektor pertanian yang pindah ke sektor industri secara terus menerus. Di sisi lain, keuntungan dari kegiatan industri digunakan untuk investasi sehingga terjadi pertumbuhan di sektor ini, yang pada akhirnya akan terjadi perubahan struktur ekonomi ke arah industri secara bertahap.

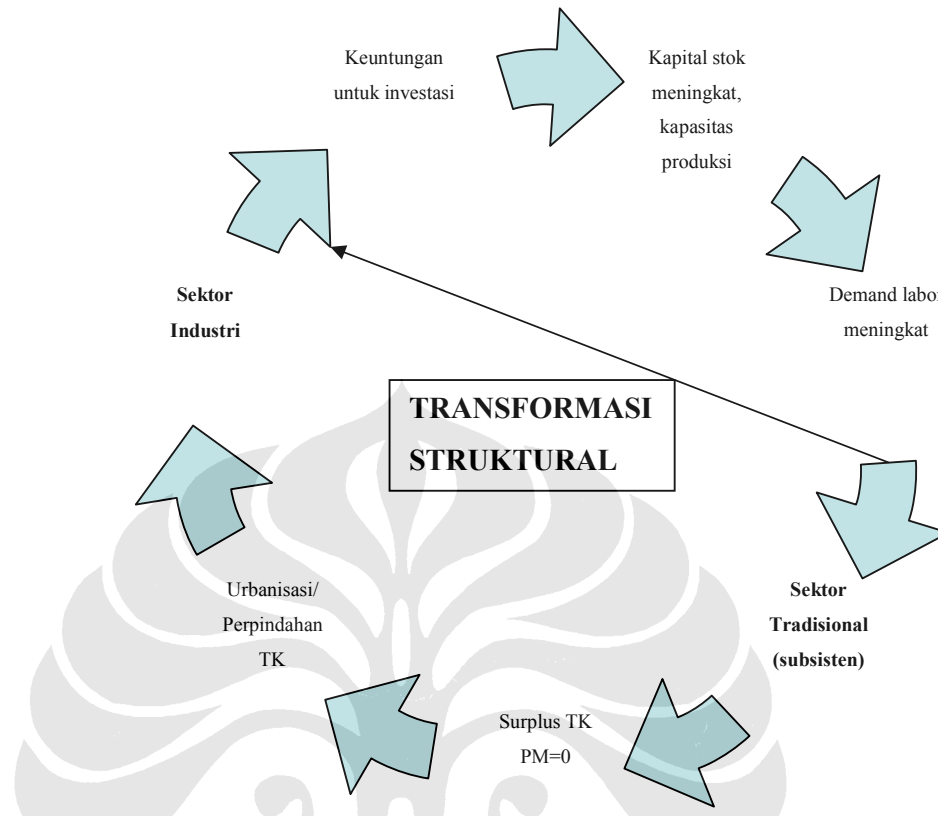
II.1.5.4 Teori Pembangunan Lewis

Asumsi yang digunakan oleh Lewis, adalah: (1) perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor pertanian yang merupakan sektor tradisional yang bersifat subsisten, dan sektor urban yang berdasarkan pada industri manufaktur, (2) sektor tradisional (subsisten) dicirikan oleh terjadinya surplus tenaga kerja dan produk marjinal tenaga kerja sama dengan nol, sehingga tenaga kerja dapat berpindah ke sektor lain tanpa mengurangi output sektor pertanian dan penawaran tenaga kerja industri bersifat elastis sempurna yang artinya berapa pun peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja dapat dipenuhi tanpa menyebabkan tekanan pada tingkat upah pada sektor industri, dengan asumsi input kapital dan teknologi bersifat tetap, (3) tingkat upah pada sektor industri lebih tinggi dari sektor tradisional dan keuntungan yang diperoleh pada kegiatan industri digunakan untuk melakukan investasi, sehingga input kapital dapat meningkat.

Proses transformasi terjadi karena surplus tenaga kerja di sektor tradisional pindah ke sektor industri yang lebih menarik, karena tingkat upah lebih tinggi. Urbanisasi ini menggerakkan sektor industri, dan keuntungan yang diperoleh seluruhnya diperuntukkan investasi sehingga kapital meningkat. Peningkatan kapital menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang dapat dipenuhi oleh sektor tradisional, sehingga terjadi perpindahan dari sektor tradisional ke sektor modern. Peningkatan tenaga kerja akan meningkatkan output dan keuntungan sektor industri, sehingga dapat menghasilkan akumulasi kapital dan meningkatkan investasi, kapasitas produksi, dan permintaan terhadap tenaga kerja.

Proses ini berlangsung secara terus menerus sehingga secara bertahap peranan sektor industri pada perekonomian bertambah dan sebaliknya kontribusi sektor tradisional semakin menurun. Pada akhirnya terjadi transformasi struktur ekonomi dari subsisten (tradisional) ke struktur ekonomi modern. Siklus (proses) transformasi dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut:

Gambar 2-4 Siklus Transformasi Struktur Ekonomi dari Tradisional ke Modern



Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tidak saja karena peningkatan investasi (*saving*), tapi juga oleh peningkatan tenaga kerja baik jumlah maupun kualitas (pertumbuhan penduduk dan pendidikan), serta peningkatan teknologi. Pada kondisi ekonomi tertutup, tingkat *saving* yang rendah (*ceteris paribus*) menyebabkan pertumbuhan yang rendah dan sebaliknya. Namun pada ekonomi terbuka akan terjadi aliran modal dari negara kaya ke negara berkembang dengan rasio *saving* dalam negeri rendah, sehingga investasi dapat ditingkatkan dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

II.1.5.5 Teori Kuznets

Simon Kuznets menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara maju dalam jangka panjang. Pertumbuhan kapasitas produksi didasarkan pada

perkembangan teknologi, pembangunan institusi atau kelembagaan, sikap dan ideologi. Terdapat enam karakteristik yang ditemui pada hampir semua negara maju, yaitu: (1) pertumbuhan output per kapita yang tinggi, (2) kenaikan tingkat produktifitas faktor produksi yang tinggi, (3) transformasi struktur ekonomi yang cepat, (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi, (5) terdapat kecenderungan negara maju untuk memperluas pasar dan sumber bahan baku pada negara lain (penetrasi ekonomi internasional), (6) penyebaran pertumbuhan ekonomi yang terbatas, hanya mencapai sekitar sepertiga penduduk dunia.

Kuznets mengemukakan bahwa modernisasi pertanian akan berdampak pada perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini dimulai dari sektor primer (tradisional), sekunder, dan berakhir pada sektor tersier (jasa). Maka itu, petani akan beralih profesi meninggalkan pekerjaannya menuju sektor industri atau jasa di kota demi mengikuti transformasi struktural tersebut. Hal ini disebabkan karena peningkatan peran sektor industri yang umumnya padat modal dan menggunakan teknologi, mengakibatkan permintaan akan sumber daya manusia meningkat. Dengan demikian proporsi pekerja di sektor pertanian akan menurun bila dibandingkan dengan proporsi pekerja di sektor industri dan jasa.

Disamping itu, Kuznets juga membandingkan perubahan yang terjadi di tiap sektor ekonomi dalam menghasilkan produksi nasional, dengan perubahan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitiannya ialah sebagai berikut¹³:

1. Sektor pertanian: perubahan sektor ini dalam penciptaan produksi nasional secara relatif hampir bersamaan dengan perubahan terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Sektor industri: perubahan sektor ini dalam penciptaan produktivitas nasional

¹³ Nurhayati, Y. *Elatisistas Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa Tahun 1995, 2000, 2005*. Thesis Program Pascasarjana Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, hal.6.

secara relatif lebih besar jika dibandingkan dengan perubahan terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Sektor jasa: perubahan sektor ini dalam penciptaan produktivitas nasional secara relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perubahan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Teori-teori pembangunan yang berkembang tidak menyinggung masalah kemiskinan secara eksplisit sebagai suatu permasalahan yang memerlukan pendekatan khusus dalam penyelesaiannya. Teori pembangunan yakin masalah kemiskinan akan teratasi dengan sendirinya melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Bahkan Kuznets berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan merupakan syarat keharusan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi pada awal pertumbuhan ekonomi tingkat kesenjangan ekonomi makin tinggi sampai pada tingkatan tertentu baru kemudian menurun. Teori Harrod-Domar juga menyatakan demikian, di mana untuk pertumbuhan yang tinggi diperlukan akumulasi modal (*capital*) melalui tabungan (*saving*). Komponen masyarakat yang mampu menabung adalah kelompok orang kaya, bukan dari kelompok orang miskin. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dapat dimotori oleh kelompok masyarakat yang mampu menumpuk modal.

Dengan demikian, pada tahap awal pertumbuhan hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar, baru setelah “kue” pembangunan cukup besar mekanisme pemerataan secara otomatis berjalan melalui distribusi kesempatan kerja dan berusaha.

Beberapa pendapat yang membantah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti dengan tingkat kesenjangan yang tinggi, yaitu: (1) Tingkat kesenjangan yang tinggi pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Masyarakat miskin tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sehingga kualitas sumber daya yang dihasilkan rendah, yang

menyebabkan produktivitas rendah. Dalam jangka panjang justru akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, (2) Kelompok masyarakat yang kaya tidak selalu menginvestasikan pendapatannya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi justru cenderung bersifat konsumtif dengan membeli barang-barang mewah yang diimpor atau belanja ke luar negeri, sehingga menimbulkan kebocoran ekonomi yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) Pendapatan yang rendah menimbulkan standar hidup yang rendah, tingkat kesehatan, dan nutrisi yang rendah, yang menyebabkan produktivitas rendah, dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi, (4) Kesenjangan yang tinggi menimbulkan efek psikologis yang berdampak buruk pada kondisi sosial politik. Kesenjangan yang tinggi menimbulkan potensi konflik sosial, sehingga menciptakan iklim yang tidak baik untuk investasi dan berusaha, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi, (5) Meningkatnya pendapatan kelompok miskin akan menstimulus permintaan yang mendorong ekspansi ekonomi.

II.1.5.6 Teori Chenery

Pembangunan ekonomi modern dapat didefinisikan sebagai seperangkat proses jangka panjang yang saling ketergantungan dari transformasi struktural yang memacu pertumbuhan¹⁴.

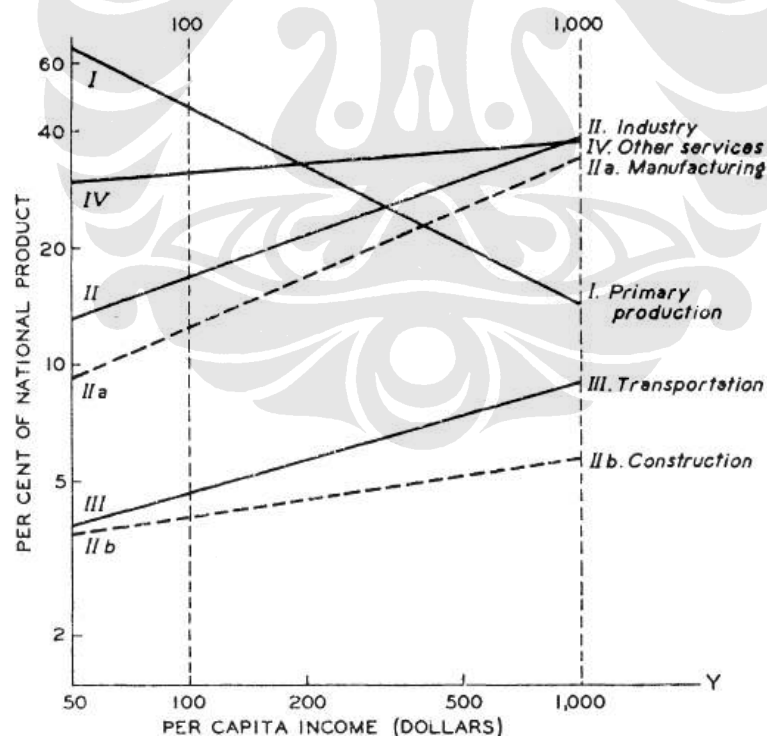
Transformasi struktural terdiri dari seperangkat perubahan-perubahan yang meliputi komposisi permintaan, produksi, perdagangan, dan tenaga kerja. Masing-masing perubahan ini merefleksikan aspek-aspek pergeseran yang berbeda dari alokasi sumber daya, yang berjalan seiring dengan kenaikan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, pola pembangunan dapat didefinisikan sebagai variasi sistematis dari struktur sosial dan ekonomi, yang dihubungkan dengan peningkatan level pendapatan per kapita. Perubahan struktur berinteraksi dengan pola pertumbuhan produktifitas dalam sebuah keseimbangan

¹⁴ Syrquin, M. (1988). Patterns of Structural Change. In H. B. Chenery and T. N. Srinivasan (eds), *Handbook of Development Economics*, Vol 2. Amsterdam: North-Holland, I, hal 205.

umum untuk menentukan tingkat dan akselerasi dari pertumbuhan¹⁵.

Dalam analisa nya mengenai perubahan peranan tiap sektor dalam proses pembangunan ekonomi, Chenery lebih menitikberatkan pada perubahan peranan dalam subsektor industri pengolahan dalam menciptakan produksi nasional. Berbeda dengan Kuznets yang lebih luas cakupan analisa nya, karena melihat perbandingan antara perubahan tiap sektor dalam menciptakan produksi nasional dengan perubahan tiap sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Chenery juga tidak melihat hubungan tiap subsektor dengan tenaga kerja karena mengabaikan analisa perubahan peranan subsektor dalam penyerapan tenaga kerja. Perubahan peranan sektor-sektor dalam produksi nasional terlihat dari gambar berikut¹⁶:

Gambar 2-5 Perubahan Peranan Berbagai Sektor dalam Produksi Nasional



¹⁵ Syrquin, M. (1986a). Growth and Structural Change in Latin America *Economic Development and Cultural Change* 34, hal 436-37.

¹⁶ Chenery, Hollis B. Patterns of Industrial Growth. *The American Economic Review*, Sept. 1960, Vol 50, hal 636.

II.1.6 Elastisitas

Elastisitas dapat diartikan sebagai besarnya perubahan relatif dari suatu variabel yang dijelaskan (Y), yang disebabkan oleh perubahan relatif dari suatu variabel penjelas (X). Secara sederhana, jika diketahui variabel penjelas adalah harga (P) dan variabel yang dijelaskan adalah jumlah barang yang diminta (Q), maka dapat dikatakan bahwa besarnya perubahan jumlah yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga (Kusumosuwidho, 1990).

Perubahan jumlah barang yang dibeli karena perubahan harga barang dapat diukur dengan elastisitas harga dari permintaan (*price elasticity of demand*). Elastisitas permintaan dari suatu barang terhadap perubahan dari suatu faktor penentunya (harga barang itu sendiri, harga barang lain, atau penghasilan konsumen) menunjukkan derajat kepekaan dari permintaan akan barang tersebut terhadap perubahan faktor-faktor diatas (Boediono, 1999).

Elastisitas menunjukkan tanggapan dari suatu variabel tidak bebas karena adanya perubahan dalam variabel bebas tertentu. Besarnya koefisien elastisitas ini ditunjukkan oleh perbandingan antara persentase perubahan variabel tidak bebas dan persentase perubahan variabel bebas yang mempengaruhinya. Jadi, dalam hal ini ditunjukkan oleh perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan harga.

Adapun manfaat mempelajari elastisitas adalah:

1. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan apakah perlu menaikkan produksi atau tidak, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil penjualan.
2. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan suatu kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan.

Hirshleifer (1985), menyatakan bahwa ada 5 bentuk elastisitas dari permintaan terhadap suatu barang yaitu:

1. Elastisitas permintaan (*demand elasticity*) atau sering disebut dengan elastisitas harga permintaan (*price elasticity*), adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga atau persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibandingkan dengan persentase perubahan harga barang. Elastisitas harga dari permintaan dimaksudkan untuk mengukur kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan yang diberi notasi E_h , adalah mengukur persentase perubahan dalam jumlah yang diminta dari suatu barang, yang disebabkan oleh persentase perubahan tertentu dalam harga barang tersebut, dalam suatu waktu tertentu. Nilai elastisitas harga dibagi menjadi 3, yaitu lebih dari, sama dengan, dan kurang dari satu. Bila harga mutlak $E_h > 1$ maka permintaan bersifat elastis yang artinya sedikit saja terjadi perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang besar terhadap permintaan harga tersebut. Jika nilai mutlak $E_h = 1$ maka permintaan bersifat *unitary* elastis, yang artinya setiap perubahan harga membawa perubahan yang proporsional terhadap permintaan. Jika nilai mutlak $E_h < 1$ maka permintaan bersifat inelastis, yang artinya persentase perubahan barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan terhadap harga diberi tanda negatif karena hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta adalah berlawanan.

2. Elastisitas penawaran (*supply elasticity*) atau sering disebut dengan elastisitas harga penawaran adalah tanggapan dari jumlah barang yang ditawarkan, sebagai akibat dari perubahan harga barang yang bersangkutan. Kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan pendapatan konsumen merupakan sesuatu yang diukur, jika membicarakan mengenai elastisitas pendapatan dari permintaan.

Perhitungan angka elastisitas pendapatan terhadap permintaan dibanyak negara berkembang biasanya dilakukan berdasarkan pengeluaran. Elastisitas macam ini adalah perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase pengeluaran konsumen. Meskipun pendapatan ditaksir hanya dengan pengeluaran, namun dalam kenyataan hasil dari kedua macam perhitungan tersebut tidak begitu berbeda, terutama bagi golongan pendapatan rendah karena golongan ini tidak mempunyai tabungan (Mubyarto, 1989).

3. Elastisitas silang adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta (x) dibagi dengan persentase perubahan harga barang lain (y). Permintaan atas suatu barang umumnya tidak hanya tergantung pada harga barang itu sendiri, tetapi juga harga barang lain. Kepekaan permintaan terhadap perubahan harga barang lain dinamakan elastisitas silang (Lipsey, 1990).

Elastisitas silang dapat bervariasi dari negatif tak terhingga ($-\infty$) sampai positif tak terhingga (∞). Bila barang a dan b adalah substitusi, maka nilai E_s positif ($E_s > 0$), karena kenaikan harga barang a akan mengakibatkan jumlah barang b yang diminta akan meningkat, sedangkan bila barang a dan b adalah komplementer maka nilai E_s adalah negatif ($E_s < 0$) karena kenaikan harga barang a mengakibatkan jumlah barang b yang diminta menurun. Barang yang mempunyai E_s sama dengan nol adalah barang independen.

Koefisien elastisitas dapat didefinisikan sebagai persentase perubahan permintaan yang diakibatkan oleh satu persen perubahan dari faktor penentu (harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, penghasilan konsumen). Mengenai konsep elastisitas perlu diingat, bahwa koefisien elastisitas didapat dari pembagian antara suatu persentase dengan suatu persentase, maka koefisien ini adalah suatu angka yang tidak mempunyai unit atau suatu angka murni atau *pure number*. Dengan demikian koefisien elastisitas dari

permintaan akan barang X bisa dibandingkan secara langsung dengan koefisien elastisitas dari permintaan akan barang Y (Boediono, 1999).

4. Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi. Elastisitas tersebut dapat dinyatakan untuk seluruh perekonomian atau, untuk masing-masing sektor, jadi:

$$E = \frac{\Delta N/N}{\Delta Y/Y}$$

$$E = \frac{\Delta N_i/N_i}{\Delta Y_i/Y_i}$$

Elastisitas kesempatan kerja secara keseluruhan dapat juga dirumuskan sebagai berikut:

$$E = \frac{\text{Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor } i}{\text{Laju pertumbuhan pendapatan (PDRB)}}$$

Misalnya:

$$E = \frac{3,011\%}{8,092\%}$$

$$E = 0,372$$

Artinya bila PDRB bertambah satu persen, kesempatan kerja yang diciptakan untuk itu akan bertambah 0,372 persen.

5. Elastisitas permintaan tenaga kerja.

Elastisitas permintaan tenaga kerja didefinisikan sebagai persentase perubahan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Secara umum dituliskan dalam persamaan:

$$E = \frac{\Delta N/N}{\Delta W/W}$$

Dimana:

E = Elastisitas permintaan tenaga kerja.

ΔN = Perubahan jumlah tenaga kerja yang terjadi.

N = Jumlah tenaga kerja mula-mula.

ΔW = Besarnya perubahan tingkat upah.

W = Tingkat upah yang sedang berlaku.

Catatan:

Dalam buku Teori Ekonomi Mikro, yang ditulis oleh Richard A Bilas, penerbit Erlangga Jakarta, tahun 1985, pada halaman 25 disebutkan:

”Telah disetujui bersama bahwa tanda minus itu dapat ditiadakan apabila yang diukur itu adalah elastisitas harga dari permintaan, sebab angka negatif itu hanya menunjukkan bahwa kurva permintaan itu miring negatif. Selanjutnya, koefisien itu adalah angka murni, artinya angka itu tidak mempunyai arti apabila kita belum memberi arti kepadanya. Jadi apakah tanda negatif itu kita pakai atau kita buang, itu tidak penting. Oleh karena angka positif itu lebih mudah dipergunakan daripada angka negatif, maka kita buang saja tanda negatif itu. Tentu saja jika kita untuk keperluan tertentu mengukur koefisien elastisitas harga permintaan bagi kurva permintaan yang merupakan pengecualian dari hukum permintaan, maka koefisiennya haruslah positif berdasarkan kemiringan kurva. Dalam kasus ini kita harus mengatakan dengan jelas bahwa kurva permintaan itu mempunyai kemiringan yang positif”.

Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung dari empat faktor, yaitu:

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal.
2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
3. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi.
4. Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya.

Untuk hal yang pertama, semakin kecil kemungkinan mensubstitusikan modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga kerja, tergantung dari jenis teknologi. Bila suatu teknik produksi mempergunakan modal dan tenaga kerja dalam perbandingan yang tepat, maka perubahan tingkat upah tidak mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja.

Kedua, salah satu alternatif pengusaha adalah membebankan kenaikan tingkat upah kepada konsumen, dengan kenaikan harga jual barang hasil produksi di pasar. Kenaikan harga jual ini menurunkan jumlah permintaan masyarakat akan hasil produksi. Selanjutnya, turunnya permintaan masyarakat terhadap produksi mengakibatkan penurunan dalam jumlah permintaan tenaga kerja. Semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, maka semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.

Ketiga, elastisitas permintaan akan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya karyawan lebih tinggi terhadap biaya produksi keseluruhan.

Keempat, elastisitas permintaan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan dari bahan-bahan pelengkap dalam produksi seperti modal, tenaga listrik, bahan mentah, dan lain-lain. Jadi, semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap dalam produksi, maka semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda, demikian juga kemampuan tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal yaitu:

1. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktifitas kerja masing-masing sektor.
2. Secara berangsur-angsur terjadi perbedaan tiap sektor dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Perbedaan laju pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja tersebut juga menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja. Elastisitas kesempatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi. Elastisitas tersebut dapat digunakan untuk seluruh perekonomian atau untuk masing-masing sektor atau sub sektor.

Konsep elastisitas ini dapat digunakan memperkirakan penambahan kesempatan kerja. Bila laju pertumbuhan kesempatan kerja dinyatakan dengan k dan laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dinyatakan dengan g , maka dapat diajukan rumus berikut:

$$k = E \times g$$

Atau laju pertumbuhan kesempatan kerja k , sama dengan elastisitas kesempatan kerja E , dikalikan dengan laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto).

Konsep elastisitas ini dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk suatu periode tertentu, atau untuk menyusun kebijakan pembangunan untuk ketenagakerjaan, yaitu dengan memilih beberapa alternatif laju pertumbuhan tiap sektor, maka dihitung kesempatan kerja yang dapat diciptakan. (Simanjuntak, 1998).

II.2 Landasan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah antara lain:

1. Penelitian oleh Anak Agung Ngurah Dunia (2003) yang berjudul “Pengaruh PDRB, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyediaan Kesempatan Kerja di Provinsi Bali Pasca Krisis 1999-2003”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari PDRB, pengeluaran pemerintah, dan investasi terhadap penyediaan kesempatan kerja di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data panel sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 1999-2003, yang terdiri dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data pengeluaran pemerintah (konsumsi pemerintah),

investasi swasta (stok kapital domestik bruto) dan kesempatan kerja (jumlah pekerja yang tersedia). Keseluruhan data diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, dan Kantor Tenaga Kerja Provinsi Bali. Data PDRB dan pengeluaran pemerintah (konsumsi pemerintah) dan investasi (stok kapital) disajikan berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 1993.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian variabel-variabel independen yaitu PDRB, pengeluaran pemerintah, secara ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyediaan kesempatan kerja. Variabel investasi juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyediaan kesempatan kerja di Provinsi Bali selama periode penelitian.

2. Penelitian oleh Edyan Rachman (2003), yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di DKI Jakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di DKI Jakarta. Adapun variabel-variabel yang digunakan untuk menelaah hubungan yang terjadi terhadap kesempatan kerja adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi yang dalam hal ini termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan jumlah angkatan kerja DKI Jakarta. Data yang dimaksud diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta dengan runtun waktu 1982-2003.

Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB, investasi, UMP, dan jumlah angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesempatan kerja di DKI Jakarta. Namun variabel investasi tidak sesuai dengan hipotesis, dimana hasil analisisnya menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja. Ketidaksesuaian ini diantaranya disebabkan oleh adanya relokasi beberapa industri ke luar wilayah DKI Jakarta. Sedangkan hasil analisis

dari variabel PDRB, jumlah angkatan kerja, dan UMP sesuai dengan hipotesis, dimana PDRB berpengaruh positif, jumlah angkatan kerja berpengaruh positif, dan UMP berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja di DKI Jakarta.

3. *Technical Note* ILO Iyanatul Islam dan Suahazil Nazara (September, 2000) yang berjudul “Estimating Employment Elasticity For The Indonesian Economy”. Penelitian ini disponsori oleh ILO (International Labour Office) dan bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja agar dapat menemukan perkembangan dalam menetapkan metodologi yang paling tepat untuk mengukur elastisitas tenaga kerja. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain ialah:

- a) Penggunaan elastisitas tenaga kerja meskipun menuai banyak kritik, adalah tetap merupakan cara yang paling baik untuk menyimpulkan intensitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan berdasarkan pada *Okun's Law*.
- b) Tidak terdapat data dan metodologi yang jelas untuk mengukur elastisitas tenaga kerja
- c) Estimasi elastisitas tenaga kerja dapat diturunkan secara langsung dari data tenaga kerja/PDB per provinsi untuk periode 1997-2006 dengan menggunakan metode ekonometri dan non ekonometri. Estimasi bervariasi dari yang nilainya 0.49 dengan menggunakan metode non ekonometri sampai dengan yang nilainya 0.66 dengan menggunakan metode ekonometri.
- d) Dengan variasi elastisitas tadi, batasan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk dapat menyerap tenaga kerja yang diperkirakan sebesar dua juta per tahunnya adalah bervariasi antara 3.47 % sampai dengan 4.68 %.

4. Penelitian oleh Yanti Nurhayati Ningsih yang berjudul *Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian, Industri, Jasa Tahun 1995, 2000, 2005*. Penelitian ini merupakan sebuah tesis yang diajukan dalam program studi kajian kependudukan dan

ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, inferensial, dan analisa shift-share, yang masing-masing menghasilkan kesimpulan. Untuk analisa deskriptif kesimpulannya adalah:

- a) PDB Indonesia terus meningkat dari tahun 1995 sampai dengan 2005 dengan kontribusi terbesar ada pada sektor industri. Namun sektor pertanian dan jasa masih menyerap tenaga kerja paling banyak.
- b) Pertumbuhan sektor pertanian di semua pulau di Indonesia meningkat dan jika dibandingkan antar pulau pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Pulau Jawa masih jauh lebih tinggi dibanding pulau-pulau lainnya. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian yang terbesar juga di Pulau Jawa.

Untuk analisa inferensial kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

- a) Angka elastisitas tenaga kerja secara nasional turun dari 0.75 pada tahun 1995 menjadi 0.68 dan 0.63 pada tahun 2005.
- b) Sektor pertanian merupakan sektor dengan angka elastisitas tenaga kerja tertinggi.
- c) Jika dikaitkan dengan karakteristik pendidikan maka ada perbedaan penyerapan pada masing-masing sektor.
- d) Negara Indonesia masih menganut pertanian tradisional dan belum menganut sistem pertanian modern.

Untuk analisa *shift share* kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Regional share terbesar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah Pulau Jawa, tetapi pertumbuhan aktual Pulau Jawa sendiri tidak sebesar *share* nya terhadap nasional, jika dilihat dari angka *differential shift* Pulau Jawa yang negatif.
- b) Regional share untuk pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia tergolong kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan aktualnya. Hal ini berarti pertumbuhan tenaga kerja di Pulau Jawa lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional.